

# PERJUANGAN MAHASISWA ANGKATAN 66: TUNTUTAN PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA (PKI)

Oleh:  
Ahmad Robiyani

## Abstrak

*Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 terjadi kudeta dari PKI. Melihat setuasi ini para pemuda terutama mahasiswa mulai melakukan protes terhadap kepemimpinan Ir. Soekarno. Pada tanggal 10 Januari tahun 1966 Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI) melancarkan demonstrasi dengan beberapa tuntutan yaitu bubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), Retool (ganti) Kabinet Dwikora dan Turunkan Harga. Seluruh mahasiswa terutama para aktivis turun kejalan menyampaikan aspirasi rakyat yang dikenal dengan TRITURA (tri tuntutan rakyat). Masa demonstran ini dikenal dengan angkatan mahasiswa 66. Menurut hemat penulis seharusnya kajian mengenai perjuangan mahasiswa sangat menarik untuk diteliti, akan tetapi pada kenyataanya kajian mengenai perjuangan mahasiswa masih sangat minim. Oleh karena itu penulis merasa sangat tertarik untuk mengkaji mengenai perjuangan mahasiswa terutama mengenai perjuangan mahasiswa. Terutama mahasiswa angkatan 66.*

## I. Pendahuluan

Pada tanggal 1 Oktober 1965 terjadi kudeta dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Secara militer gerakan PKI dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion I Resimen Cakrabirawa (Pasukan Pengawal Presiden) selaku pemimpin formal seluruh gerakan. Mereka mulai bergerak pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, didahului dengan gerakan penculikan dan pembunuhan terhadap enam perwira tinggi dan seorang perwira pertama dari Angkatan Darat. Kesemuanya dibawa ke Desa Lubang Buaya. Mereka dianiyaya dan akhirnya dibunuh oleh anggota-anggota pemuda rakyat, Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) dan lain-lain organisasi satelit PKI. Semua jenazah dimasukkan kedalam sebuah

sumur tua lalu ditimbun dengan sampah dan tanah. Keenam perwira tinggi yang dibunuh tersebut adalah:<sup>1</sup>

1. Menteri/Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad) Letnan Jenderal Ahmad Yani;
2. Deput II Pangad (wakil II Panglima Angkatan Darat), Mayor Jenderal R Soeprapto;
3. Deput III Pangad (wakil III Panglima Angkatan Darat), Mayor Jenderal Harjono Mas Tirtodarmo;
4. Asisten I Pangad (wakil I Panglima Angkatan Darat), Mayor Jenderal Siswono Parman;
5. Asisten IV pangad (wakil IV Panglima Angkatan Darat), Brigadier Jenderal Donald Izacus Pandjaitan;
6. Inspektur Kehakiman/Oditur Jendral Angkatan Darat, Brigadier Jenderal Soetojo Siswomihardjo.

Melihat situasi tersebut, para pemuda terutama mahasiswa mulai melakukan protes terhadap kepemimpinan presiden Soekarno. Perjuangan mahasiswa mengambil tempat yang utama dalam sejarah bangsa Indonesia dalam tidak stabil politik dalam Republik Indonesia, mereka mengambil paksa untuk memelopori perjuangan tanpa menunggu perintah dari siapapun. Sejarah Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjuangan mahasiswa, bahkan pada akhirnya sejarah Indonesia adalah perjuangan mahasiswa. Mereka yang memelopori perjuangan dan meneruskan perjuangan bangsa Indonesia. Sementara itu, telah muncul mahasiswa baru yang merupakan penggagas baru dalam pergerakan. Mahasiswa memiliki sifat semangat dan lebih radikal, karena mahasiswa memiliki sifat yang lebih kuat. Demikianlah kenaikan menuntut perjuangan sesuai dengan peningkatan masa.<sup>2</sup>

Pada tanggal 10 Januari Tahun 1966 Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI) melancarkan demonstrasi dengan beberapa tuntutan yaitu bubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), Retool

---

<sup>2</sup>Selamat Muljana, *Kesadaran Nasional : dari Kolonialisme sampai kemerdekaan jilid I* (Yogyakarta: LKIS,2008), p. 283.

(ganti) Kabinet Dwikora dan turunkan harga. Seluruh mahasiswa terutama para aktifis turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi rakyat tersebut atau dikenal dengan TRITURA (Tri/tiga Tuntutan Rakyat). Masa demonstran ini dikenal dengan angkatan mahasiswa 66. Pada masa ini gerakan mahasiswa berperan besar dalam perubahan bangsa Indonesia yang sedang mengalami keterpurukan politik. Kemudian gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa/pemuda bangsa Indonesia pada tahun 1966 inilah yang akan menumbangkan Orde Lama dan mengahapus PKI yang telah menyimpang dari cita-cita proklamasi.<sup>3</sup>

## **II. Lahirnya Perjuangan Mahasiswa Indonesia Masa Orde Lama**

### **Kondisi Perpolitikan Pada Masa Orde Lama Tahun 1945-1966**

Setelah sekian lama berada dalam belenggu penjajahan, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Rakyat Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan disampaikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia, bertempat kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta pukul jam 10 waktu Indonesia bagian Barat.<sup>4</sup>

Mendengar Indonesia Telah melaukan referendum dan melaksanakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 makan Belanda berkeinginan untuk kembali menjajah Indonesia yang datang bersama dengan tentara sekutu, disambut pemuda Indonesia pada aksi perlawanan guna mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan dalam tanggal 17 Agustus Tahun 1945. Seluruh rakyat Indonesia mengadakan perlawanan yang gigih. Pertempuran meluas sampai ke Magelang, Ambarawa, Bandung, Medan dan Padang. Nampaknya pihak sekutu yang tugas utama adalah melucuti Tentara Jepang dan melepaskan tawanan yang ditahan oleh pihak

---

<sup>3</sup> Nazir Abu Nain, *Angkatan 66 Dalam Lintas Sejarah Perjuangan Bangsa* (Jakarta ; cipro media, 2011) pp.70-71.

<sup>4</sup> Garda Maeswara, *sejarah Revolusi Indonesia 1945-1950* (Jakarta; Narasi . 2010). p. 3.

Jepang tidak mampu mengendalikan pasukan Belanda yang bertujuan mengembalikan Indonesia dibawah pemerintah Belanda. Aksi militer Belanda telah menjadikan seluruh Indonesia menjadi daerah pertempuran. Perhatian bangsa Indonesia pada saat itu adalah bagaimana memepertahankan setiap jengkal tanah untuk mengusir penjajah Belanda yang ingin kembali berkuasa di bumi Indonesia. Belanda melakukan blockade ekonomi, politik, dan militer, sehingga rakyat sangat menderita<sup>5</sup>.

Hubungan luar negeri yang dirintis sejak perang kemerdekaan mengalami perkembangan sesudah pengakuan kedaulatan 1949. Kabinet Republik Indonesia Serikat disebut (RIS) dibawah Perdana Menteri Hatta melaksanakan hubungan luar negeri yang dititik beratkan pada negara-negara Asia dan negara-negara Barat, karena kepentingan ekonomi Indonesia masih terkait di Eropa. Pada umumnya pasar hasil bumi Indonesia masih berpusat di Negeri Belanda dan Eropa Barat. Untuk kepentingan yang sama Republik Indonesia mengirimkan Djuanda guna mencari bantuan yang tidak mengikat ke Amerika Serikat.gerakan revolusi ini diteruskan oleh kabinet penggantinya yaitu Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951) setelah kembali kepada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Kabinet Sukiman (April 1951- Februari 1952) pengganti Kabinet Natsir, menempuh kebijakan yang menyimpang dari politik bebas aktif. Pada bulan Januari tahun 1952 Menteri Luar Negeri Ahmad Subardjo mengadakan pertukaran surat dengan Duta Besar Amerika Serikat Marle Cocharan dalam rangka mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat berdasarkan *Mutual Security Act* (undang-undang keaman bersama Amerika Serikat tahun 1951).<sup>6</sup>

Di Bidang politik luar negeri Indonesia menyatakan sebagai tujuan jangka pendek “melanjutkan perjuangan anti-imperialisme ditambah dengan mempertahankan kepribadian bangsa Indonesia

---

<sup>5</sup> Nazwir Abu Naim, *Angkatan 66 dalam lintasan sejarah perjuangan bangsa* (Jakarta: Perpustakaan Nasional , 2010), p12.

<sup>6</sup> www. Pengertian-pengertian.com

ditengah-tengah teriakan ke kanan dan ke kiri, dalam pergolakan dunia menuju kepada satuimbangan baru. Dalam jangka panjang, bidang republik yang menyangkut luar negeri, Revolusi Indonesia bertujuan untuk “melenyapkan imperialisme” di mana-mana yang mencapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia yang kekal dan abadi.<sup>7</sup>

Di Indonesia, pergerakan nasional juag mencita-citakan pembentukan negara demokrasi anti foedarisme dan anti emperialisme, dengan tujuan membentuk rakyat sosialis.<sup>8</sup> Ditengah-tengah teriakan idiologis dan militer yang bergerak menuju kekuatan dunia dan di tengah-tengah terjadinya mutasi besar-besaran di bidang politik dan teknologi, secara konsepsional politik *non-alignment* sudah dianuti oleh banyak Negara, sejauh sebelum presiden Nasser dan Presiden Tito untuk pertama kalinya mengemukakan gagasan untuk mengadakan konferensi tingkat tinggi (KTT) Negara-negara *non-aligned*. (Gerakan Non-Blok (GNB) (bahasa Inggris: *Non-Aligned Movement/NAM*) adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari lebih dari 100 negara-negara yang tidak menganggap dirinya beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan besar apapun).<sup>9</sup>

Sejumlah besar dokumen dari tahun 1950-an baik dalam bentuk komunikasi bersama maupun pernyataan-pernyataan politik artinya, menunjukkan besar garis politik Indonesia tentang *non-alignment* adalah:

- a. Tanpa mengikatkan diri pada fakta-fakta militer yang ada, berusaha menghapuskan atau setidaknya mengurangi ketegangan-ketegangan Internasional yang lahir karena pertentangan dua blok dunia.
- b. Menjauhkan diri dan meninggalkan pola penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan dan tekanan untuk

---

<sup>7</sup> Marwati Djoned Poesponegoro, *et al., eds. Sejarah Nasional Indonesia VI.*, p. 324

<sup>8</sup> Selamat Muljana, *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*, (Yogyakarta; LKIS, 2008), p. 63.

<sup>9</sup> <http://www.bahasaindonesia.net/nonalignment>, tanggal akses 22:23 : 05 November, 2015.

sebaliknya mengutamakan saluran perundingan-perundingan sebagai alat penyelesaian sengketa.

- c. Menghapuskan penjajah sehingga pergaulan atau sosialisasi antar bangsa dan antar negara didasarkan pada prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai dimana penghormatan terhadap integritas wilayah, kemerdekaan dan kedaulatan serta memilih sistem sosial, merupakan kaidah-kaidah yang harus dijunjung tinggi.

Tiga hal tersebut merupakan tonggak-tonggak yang memberikan arah pada kemudi diplomasi Republik Indonesia, tidak saja pada waktu *non-alignment*. Tetapi juga sejak berdirinya Negara Proklamasi Pada Tanggal 17 Agustus Tahun 1945.<sup>10</sup>

### **Masuknya Partai Komunis Indonesia (PKI) Dalam Perpolitikan Nasional**

Pada tanggal 18 September tahun 1948, PKI dibawah pimpinan Musso melakukan pemberontakan di Madiun. Musso menuduh Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai kaki tangan Jepang dan Amerika. Karena itu lah pada tanggal 19 September tahun 1948 Soekarno berpidato melalui saluran radio, menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengutuk PKI dan meminta rakyat untuk melih dua opsi yaitu ikut Musso dan partai komunisnya yang membawa Republik Indonesia pada tidak setabilnya politik atau Soekarno dan Hatta yang dengan bantuan Allah SWT. akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka.<sup>11</sup>

Pahan komunis Indonesia dapat kita lacak pada masa sebelum tahun-tahun pertama abad ke-20 dan saat pada didirikannya ISDV (*Indische Social Democratische Vereeniging*) (partai yang didirikan atas inisiatif tokoh sosialis belanda. Henk Sneevliet pada 1914. Partai

---

<sup>10</sup> Marwati Djoned Poesponegoro, *et al., eds. Sejarah Nasional Indonesia VI.*, pp.450-451.

<sup>11</sup> Masykur Arip Rahman, *Tan Malaka Pahlwan Besar yang Dilupakan Sejarah*, (Jogjakarta; Palapa, 2013), p. 265.

ini merupakan cikal bakal Partai Komunis Indonesia.)<sup>12</sup> atau Perkumpulan Sosial Demokrat India), sampai dengan terjadinya kekacauan-kekacauan di wilayah pedesaan pada akhir abad kesembilan belas yang masing-masing memiliki ribuan karakter yang kemudian akan disesuaikan dengan kondisi setempat pada saat itu oleh PKI (Partai Komunis Indonesia) maupun partai-partai lainnya. PKI kemudian segera memulai berbagai aktifitas PKI yang cenderung bersifat *underground* pada saatnya ketika dikumandangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.<sup>13</sup> Dengan demikian varian komunisme yang diterapkan di Republik Indonesia memiliki perbedaan yang dengan konsep aslinya yang berasal dari daratan Eropa. Meskipun dipertahankan berbagai prinsip dasar Marxisme, haruslah diakui bahwa komunisme di Asia umumnya dan di Indonesia pada khususnya memiliki berbagai perbedaan yang cukup mendasar.<sup>14</sup>

Pada bulan Mei 1950 persetujuan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Republik Indonesia ditandatangani, yang didahului oleh penyerahan mandate dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sementara pasukan laskar-laskar bersenjata ada yang masih berada diluar negeri, artinya bergerak liar. Pada saat itu kembalilah D.N Aidit dan M.H Lukman dari luar negeri setelah melarikan diri waktu pembenrotakan Madiun. Di Priok mereka diterima oleh Syam Kamaru Zaman waktu itu pemimpin Buruh Kiri di Priok. D.N Aidit kemudian ditangkap oleh yang berwajib, tetapi wali kota Jakarta Surdjo ikut campur dalam penangkapan D.N Aidit, kemudian D.N Aidit dilepaskan kembali oleh pihak yang berwajib. Waktu itu PKI (Partai komunis Indonesia) berada dalam pimpinan Alimin, sesudah

---

<sup>12</sup> Eko Sujatmiko, Kamus IPS , Surakarta: Aksara Sinergi (Media Cetakan I, 2014). p.114.

<sup>13</sup> Peter Edman, *Komonisme Ala Aidit kisah partai komunis Indonesia di bawah kepemimpinan D.N. Aidit 1950-1965* (Townsville: center for Information Analysis, 2005), pp.8-9.

<sup>14</sup> Edman, *Komonisme Ala Aidit kisah partai komunis Indonesia di bawah kepemimpinan D.N. Aidit 1950-1965..*, p.13.

pimpinan Alimin meninggal atau melarikan diri. Alimin mulai lagi membangun partai PKI, tidak atas dasar “jalan baru Muso”, tetapi dengan mengambil peran sesedikit mungkin dalam kemerdekaan dan konsentrasi kedepan konsolidasi Buruh, Pemuda, Tani, dan Wanita.<sup>15</sup>

Sejak tahun 1950-an PKI (Partai Komunis Indonesia) mengadakan penggalangan kekuatan massa didesa-desa. Penggalangan ini diadakan dengan pertimbangan penduduk pedesaan meliputi 80% dari penduduk Indonesia, dan karena peran mereka tidak dapat diabaikan. Desa merupakan sumber tenaga, sumber bahan keperluan hidup dan pangkalan kekuatan revolusi atau pangkalan tempat bertahan dari serangan kaum kontrarevolusi.

Langkah selanjutnya PKI untuk menginfiltrasi PNI mulai berhasil yang terbukti sejak tahun 1959 PNI mengubah pengertian *Marxisme* menjadi “*marxisme* yang diterapkan dalam kondisi Indonesia”. Sejak itu pula PNI menempuh garis politik radikal kiri anti-Amerika yang sudah barang tentu didorong dan didukung dengan penuh semangat oleh PKI. Beberapa tokoh PNI sadar bahwa perubahan pengertian *marxisme* itu telah dimanfaatkan oleh PKI. Oleh karena itu, diantara mereka ada yang berusaha agar arti *marxisme* tidak diselewengkan oleh golongan kiri yang berada dalam tubuh PKI. PKI (Partai Komunis Indonesia) berusaha keras agar garis politik PNI tidak mengikuti garis politik PKI. Akan tetapi golongan kiri dalam Badan Bekerja akhirnya mereka disingkirkan dengan diberi predikat “*marxisme* gadungan”. Presiden Soekarno membenarkan tindakan itu.<sup>16</sup>

Kekalahan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) telah membuka jalan bagi PKI mendominasi peran di Masyarakat. Tentara tidak hanya menjadi orang-orang PKI dan *onderbouw* menjadi OPR tetapi juga memberi kesempatan di

---

<sup>15</sup> Soerejo, *Siapa Menabur Angin Akan Menunai Badai G30S/PKI dan Apa Peran Bung Karno...*, p.51.

<sup>16</sup> Marwati Djoned Poesponegoro, *et al., eds. Sejarah Nasional Indonesia VI...*, p.475.



pemerintahan. Peraktis setelah PRRI diadakanlah hampir seluruh wilayah negeri yang berada di Sumatra Barat di Indonesia oleh orang-orang PKI. Kekuasaan ini membuka peluang bagi PKI untuk mengajak masyarakatnya. Untuk menarik minat simpatik masyarakat bergabung baik ke dalam partai ataupun dalam organisasi massanya. Untuk menarik minat dan simpati masyarakat di tawarkan alat-alat pertanian bagi para petani.

### **Kondisi Perekonomian Tidak Stabil**

Sebelum meletusnya Gerakan 30 September (G-30-S), rakyat selalu bungkam karena merasa tertekan oleh teror mental dan fisik PKI dengan provokasi dan intimidasi. Masyarakat bagaikan sekawanan lembu yang digiring kesana kamari, serta bersorak sesuai dengan keinginan Dirgen Agungnya, Presiden Soekarno. Uneg-uneg ini meledak setelah tanggal 1 Oktober tahun 1965. Tetapi politikal solution yang dijanjikan sejak awal Oktober tahun 1965 tidak kunjung dikelarkan oleh Presiden Soekarno. Rakyat juga sudah muak mendengar dan insunuasinya dalam usah memperkecil soal Gestapu.<sup>17</sup>

Kekacauan politik pada tahun 1959 terjadi bersamaan dengan kekacauan ekonomi yang melahirkan inflasi. Dalam rangka membendung inflasi dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1959 yang mulai berlaku tanggal 25 Agustus 1959 pukul 06.00 pagi. Peraturan itu dimaksudkan untuk mengurangi kebanyakan uang dalam peredaran untuk kepentingan perbaikan keuangan dalam prekonomian Negara. Untuk mencapai tujuan nilai uang kertas pecahan Rp 500,00 dan Rp 1000,00 yang ada dalam prederaan pada saat berlakunya peraturan itu diturunkan masing-masing menjadi Rp 50,00 dan Rp 100,00 agar mata uang yang beredar di masyarakat tidak terlalu banyak dan tidak terlalu tinggi.

Selain itu juga kebijakan menurunkan inflasi dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 3 Tahun 1959

---

<sup>17</sup> Soerejo, *Siapa Menabur Angin Akan Menunai Badai G30S/PKI dan Apa Peran Bung Karno...*, pp.261-262.

Tentang Pembekuan sebagian simpanan pada bank-bank yang dimaksudkan untuk mengurangi uang yang beredar terutama dalam tahun 1957-1958 sangat meningkat jumlahnya. Hal ini merugikan keuangan negara karena banyaknya uang yang beredar di masyarakat, antara lain adalah pedagang-pedagang export-inpor dan perdagangan dalam negeri. Penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lain merupakan sumber-sumber penting untuk penerimaan negara dalam mata uang rupiah ikut merosot dan, devisa anggaran belanja menjadi lebih besar lagi.<sup>18</sup>

### **III. Kontribusi Kaum Muda Indonesia Pada Masa Orde Lama Terbentuknya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI)**

Sajak tahun 1963-1964 bangsa Indonesia mengalami krisis yang menyebabkan rakyat Indonesia gelisah dan bingung, yang menimbulkan akibat-akibat fisik disintegrasi sosial-ekonomi dalam sekala yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Kekacauan pada tahun 1965-1966 lebih dapat disaksikan saat ini seperti Berjuis kehidupan rakyat biasa relatif terisolir karena hanya membandingkan dan membaca angka statistik kemiskinan dan mati karena kelaparan.<sup>19</sup>

Tanggal 8 Oktober tahun 1966. Para pemuda anti komunis kini menguasai jalan-jalan, dan membakar markas besar PKI di Jakarta. Pada akhir bulan Oktober tahun 1966, para mahasiswa anti PKI membentuk KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dengan dukungan dan perlindungan tentara. KAMI berintikan kelompok pemuda Islam, Katolik dan mantan PSI. Front kesatuan pelajar yang sama disebut KAPPI (Kesatuan Aksi Pelajar Pemuda Indonesia), dan front alumni Universitas, KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia) dibentuk pada awal tahun 1966. Kedua front yang

---

<sup>18</sup> Marwati Djoned Poesponegoro, *et al.*, eds. *Sejarah Nasional Indonesia VI.*, p.430.

<sup>19</sup> Onghokham, *Soekarno Orang Kiri Revolusi dan G-30-S 1965*, (Depok; Komunitas Bambu, 2013), p. 156

terakhir ini berintikan simpatian Masyumi-PSI. Sementara itu, penahanan masih terus berlangsung lebih dari 10.000 aktivis dan pemimpin PKI telah diculik di Jakarta dan Jawa Barat pada bulan Desember 1965, diantara mereka adalah Pramoedya Ananta Toer.<sup>20</sup>

Atas prakarsa Prof. Dr. Syarip Thayeb Menteri PTIP (Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengtahuan) dibentuklah organisasi gabungan mahasiswa dari 17 ormas mahasiswa di Jakarta yang diberi nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).<sup>21</sup> KAMI lahir ditengah-tengah terjadinya dualisme ormas kemahasiswaan akibat adanya nasakomisasi dunia kemahasiswaan yang tepusat pada Perhimpunan Perserikatan Mahasiswa Indonesia (PPMI) yang merupakan federasi dari ormas-ormas mahasiswa eksternal Universitas dan Majelis Mahasiswa Indonesia (MMI) yang merupakan gabungan dewan-dewan mahasiswa intra Universitas, dimana kedua organisasi tersebut dikuasai oleh kelompok mahasiswa kiri.

Untuk mempertanggungjawabkan atas inpotenya kedua federasi organisasi mahasiswa tersebut dan mendobrak dualisme dikalangan dua organisasi mahasiswa KAMI. KAMI lahir untuk menghimpun mahasiswa anti komunis terutama organisasi mahasiswa ekstra Universiter. Dalam pada itu, Perhimpunan Perserikatan Mahasiswa Indonesia (PPMI) mengadakan kongres bertempat digedung (Ikatan Dokter Indonesia) IDI di Jalan Sam Ratulangi Jakarta Pusat, dengan acara tunggal pembubaran PPMI. Kongres PPMI yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember tahun

---

<sup>20</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* ( Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2010), pp.594-595.

<sup>21</sup> Soegiarso Soerejo, *G-30-S/PKI dan Apa Peran Bung Karno Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai* (Jakarta: PT. Rola Sinar Perkasa, 1988), pp.262-263.

1965 memutuskan menerima secara aklamasi pembubaran PPMI.<sup>22</sup> program perjuangannya ada tiga macam, yaitu:

1. Bubarkan PKI dan Ormas-ormas yang bernaung dibawahnya.
2. Bersihkan Kabinet Dwikora.
3. Turunkan harga-harga.

Oleh karena tiga tuntutan yang telah ditulis di atas sebenarnya diambil oleh para mahasiswa dari hati nurani rakyat yang tidak buka suara, maka proklam perjuangan KAMI ini disebut juga Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA). Aksi mahasiswa tersebut untuk pertama kalinya dilancarkan pada minggu ke 15 sesudah meledak G-30-S. dan yang menjadi sasaran utama ditujukan pada Presidium Kabinet dan DPR-GR.<sup>23</sup>

### **Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA)**

Tidak tegasnya sikap Presiden Soekarno dalam menghukum dan menindak Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang pemberontakan berdarah G-30-S telah menimbulkan kemarahan rakyat. Pada tanggal 10 Januari tahun 1966, dengan dikordinasikan oleh KAMI Pusat dan KAMI Jaya, dalam apel besar bertempat di halaman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dihadiri oleh para mahasiswa, pemuda dan pelajar tercetuslah tiga tuntutan Rakyat yaitu bubarkan (Patrai Komunis Indonesia) PKI sebagai dalang pemberontakan berdarah G-30-S, Rombak Kabinet dan Turunkan Harga yang dihadiri oleh Komdan RPKAD Kol. Sarwo Edhie Wibowo. Kemudian para mahasiswa mengadakan aksi turun ke jalan menyusuri Jalan Diponegoro menuju Hotel Indonesia (HI) dan terus

---

<sup>22</sup> Nazwir Abu Nain, *Angkatan 66 dalam Lintasan Sejarah Perjuangan Bangsa "Meluruskan History Bangsa Demi Generasi"* (Jakarta: Cipro Medi, 2011). pp. 73-74.

<sup>23</sup> Soerejo, *G-30-S/PKI dan Apa Peran Bung Karno Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai..*, p.263.

menuju kantor Waperdam III Chairul Saleh untuk menyampaikan tuntutan mahasiswa yang telah dirumuskan dalam TRITURA.<sup>24</sup>

Menanggapi hal itu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menyatakan tetap taat kepada Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi ABRI dan memelihara kekompakan sesama ABRI dan kekompakan antara rakyat Indonesia dengan ABRI. Sebelumnya pimpinan Angkatan Darat juga menyatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia adalah barisan Soekarno, sehingga tidak perlu lagi membentuk barisan Soekarno secara fisik. Dua hari kemudian. Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah (PPLRADA) Jawa Barat mengeluarkan larangan pembentukan Barisan Soekarno dalam bentuk organisasi apapun di daerah Jawa Barat. Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI) pusat mengeluarkan pernyataan mendukung larang tersebut karena pembentukan barisan itu secara fisik akan meningkatkan perpecahan dikalangan rakyat.<sup>25</sup>

Tidak berhasilnya membentuk barisan Soekarno, maka pada tanggal 20 Januari tahun 1966 Presiden Soekarno kembali memberi komando untuk membentuk barisan Pembela Pemimpin Besar Revolusi Indonesia. Pihak yang tidak senang terhadap Tritura menghasut masa Palang Merah Indonesia PMI/Front Marhaenis Ali Soerachman Partai Nasional Indonesia (PNI) untuk membalas aksi-aksi KAMI dengan perbuatan teror. Hanya dengan dukungan Front Pancasila dan ABRI perjuangan Tritura dapat diteruskan. Front Pancasila mengeluarkan pernyataan lima pasal pada tanggal 14 Februari 1966 yang pada pokoknya mendukung tritura dan menolak segala fitnahan yang diajukan kepada KAMI dan Front Pancasila.

Selanjutnya, Presiden Soekarno melakukan *reshuffle* kabinet. Ditegaskan oleh Presiden Soekarno *reshuffle* bukan karena perjuangan kesatuan-kesatuan aksi. hasil *reshuffle* yang disebut “Kabinet Dwikora yang disempurnakan” ternyata sangat mengecewakan harapan rakyat

---

<sup>24</sup> Naim, *Angkatan 66 dalam Lintasan Sejarah Perjuangan Bangsa* “Meluruskan History Bangsa Demi Generasi”..., p.76.

<sup>25</sup> Marwati Djoned Poesponegoro, *et al., eds. Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), pp.545-546.

Indonesia. Kabinet baru yang beranggotakan 102 Menteri diumumkan pada tanggal 21 Februari tahun 1966. Hal yang mencengangkan rakyat Indonesia ialah disingkirkannya tokoh-tokoh yang gigih menentang G30S/PKI, seperti Jendral A.H Nasution, Menteri Koordinator Hankam/Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Sebaliknya, Presiden Soekarno mengangkat sejumlah orang yang diragukan i'tikad baiknya yang diindikasikan terlibat dalam G30S/PKI, seperti Ir. Surachman dan Oei Tjoe Tat, S.H. Tidak mengherankan jika para mahasiswa memberi nama Kabinet ini dengan nama Kabinet Gerakan 30 September (GESTAPU) atau "Kabinet 100 Menteri" karena jumlah anggotanya 100 orang lebih.<sup>26</sup>

Tanggal 10 Januari tahun 1966 merupakan momentum sejarah yang penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam menemukan jati dirinya sekaligus melakukan koreksi atas berbagai kekeliruan yang dibuat dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa. Meningkatnya aksi-aksi mahasiswa, pemuda dan pelajar mendapat dukungan nyata dari masyarakat. Kemudian lahirlah Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesaktuan Aksi Pelajar Indonesia (KPI), Kesatuan Serjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), serta aksi lainnya. Mereka yang tergabung dalam kesatuan-kesatuan aksi inilah yang oleh masyarakat diberikan nama Angkatan 66, yang berintikan mahasiswa, pelajar dan pemuda. Lahirnya KAPPI pada tanggal 9 Pebruari 1966 merupakan suatu proses yang panjang, dan tidak mudah, pada masa pra G30S/PKI organisasi pelajar yang non afiliasi dan cukup berpengaruh hanya Pelajar Islam Indonesia (PPI), dan Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) pancasila. Maka dalam pembentukan KAPPI dua organisasi ini mempunyai peran sangat besar.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Marwati Djoned Poesponegoro, *et al., eds. Sejarah Nasional Indonesia VI.*, p.546.

<sup>27</sup> Naim, *Angkatan 66 dalam Lintasan Sejarah Perjuangan Bangsa "Meluruskan History Bangsa Demi Generasi"...*, p.81

## Aksi Turun ke Jalan

Pada tanggal 20 Oktober tahun 1965 Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Mayor Djenderal Syarif Thayeb mengumpulkan berbagai Organisasi Mahasiswa untuk membentuk suatu organisasi yang dapat menghimpun semua elemen organisasi kemahasiswaan agar para aktifis Mahasiswa menjadi lebih terkoordinir dan lahirilah organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada tanggal 10 Januari tahun 1966 Masehi, KAMI melancarkan demonstrasi dengan beberapa tuntutan, yaitu bubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), *reshuffle* Kabinet Dwikora dan Turunkan Harga. Aksi ini kemudian diperingati sebagai hari Kebangkitan Mahasiswa. Tiga hari setelah itu tuntutan tersebut pemerintah daerah Jakarta mengumumkan penurunan tarif angkutan Bus dari Rp. 1000 jadi Rp. 200, penurunan harga minyak sebesar 50 persen pada tanggal 15 Januari 1966, dan pembubaran partai PKI pada tanggal 11 Maret 1966. Gerakan Kesatuan Aksi Mahasiswa KAMI ini dikenal dengan angkatan 66 yang dipelopori oleh Cosmas Batubara, Jamroni, Marye Muhammad, Ismut Hadad dan Nano Karim.<sup>28</sup>

Pada tanggal 2 Mei tahun 1966 ribuan mahasiswa memenuhi gedung-gedung dan sidang Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong (DPR-GR) untuk menyampaikan sebuah Nota Politik. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) kepada DPR-GR yang pada tanggal 2 Mei tahun 1966 sedang mengadakan Sidang Pleno Terbuka untuk memulai persidangan keempat tahun 1965-1966. Nota Politik tersebut dibacakan oleh ketua Presidium Kami Pusat. Komnas Batu Bara di depan sidang yang untuk keperluan itu telah diskors oleh ketua sidang, H. Achmad Sjaichu. Nota Politik mengupas penyelewengan-penyelewengan konstitusional dalam masa-masa Orde Lama dan menuntut pelaksana Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dikemukakan pula dalam Nota tersebut bahwa MPRS yang direncanakan bersidang pada tanggal 12 Mei

---

<sup>28</sup> Zaenal Abidin, *Kapita Selekta Sejarah* (Serang: Lembaga Penelitian IAIN "SMH" Banten, 2011), pp. 192-194.

1966. kemudian diundurkan, supaya memberikan tugas kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan sesuai dengan surat Perintah Presiden tanggal 11 Maret tahun 1966.

Nota Politik Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tersebut juga tidak membenarkan pendapat bahwa lembaga-lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong (DPR-GR) Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) serta Dewan Perwakilan Agung (DPA) tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum karena pembentukannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila MPRS dan DPR-GR tidak dianggap sah pada tanggal 12 Mei 1966. dibubarkan PKI, semua kekuasaan sepenuhnya akan jatuh ke tangan Presiden Soeharto. Sidang pleno DPR-GR pada hari itu telah menandakan pembicaraan anggota DPR-GR Dachlan Ranuwihardjo S.H., yang antara lain mengusulkan agar untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsisten, pimpinan DPR-GR tidak ditunjuk oleh Presiden Soeharto, tetapi dipilih oleh anggota-anggota DPR-GR sendiri. Juga diusulkan agar pimpinan DPR-GR tidak menjadi anggota Kabinet.<sup>29</sup>

Setelah mendengar pendapat golongan-golongan mengenal usul itu sidang Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong (DPR-GR) pada tanggal 12 Mei tahun 1966 tersebut mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Pimpinan DPR-GR Demisioner.
2. Mengangkat *care taker* pimpinan DPR-GR yang terdiri dari H. A. Sjaichu, Laksamana Muda (L) Mursalin Daeng Mamanggung, dan Brigadir Dr. Sjarif Thajeb.

Kemudian pada tanggal 17 Mei 1966 DPR-GR memilih pimpinannya yang terdiri atas: Ketua : H.A. Sjaichu dari golongan Islam, Wakil Ketua: Mohammad Isnanaeni dari golongan Nasionalis, Wakil Ketua: Drs. Ben Mang Reng Say dari golongan

---

<sup>29</sup> Sudharmono, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973 Jilid III* (Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada, 1975), p.96.



Kristen/Khatolik,Wakil Ketua: Laksamana Muda (L) Mursalin Daeng Mamanggung dari golongan Karya dan Wakil Ketua: Brigadir Jenderal Dr. Sjarif Thajeb dari golongan Karya.<sup>30</sup> Para pemimpin DPR-GR yang baru yang dipilih oleh dan di antara anggota DPR-GR sendiri pada tanggal 17 Mei 1966. DPR-GR memegang peranan yang penting dalam perjuangan Orde Baru. dan Bagan Susunan Kekuasaan di dalam Negara Republik Indonesia.<sup>31</sup>

#### **IV. Dampak Dari Perjuangan Mahasiswa Indonesia Pada Masa Orde Lama**

##### **Dibubarkannya Partai Komunis Indonesia (PKI)**

Pada pertemuan 09-11 November 1965 di Jakarta Muhammadiyah mengumumkan bahwa pembasmian Gestapu/PKI sama dengan perang pisabilillah dan kelompok Islam lainnya mendukung pandangan ini. Apapun yang mungkin dimaksud oleh para pemimpin Islam dengan perang suci, pengumuman ini tampaknya untuk menjustifikasi pembunuhan terhadap para komunis sebagai tugas agama dan tiket masuk surga bagi setiap muslim yang kehilangan nyawanya dalam kekerasan itu. Masyarakat Indonesia yang mencurigai fanatisme laten Islam merasa kecurigaan mereka kini terbukti. Oleh karena politik periode 1950-1965 telah semakin bersesuaian dengan kesetiaan aliran di Jawa, begitu juga banyak pembunuhan terjadi menurut perbedaan aliran. Tentara mendorong dan mendukung orang-orang fanatik dari pihak santri masyarakat Jawa menemukan sasaran PKI diantara saudara-saudara mereka yang abangan. Pemisah antara santri dan abangan ditingkat desa semakin melebar karena terjadinya pertumpahan darah akibat mendukung PKI di Jawa. Banyak orang yang ditangkap sebagian “PNI” juga dibunuh, perseteruan lama diselesaikan dalam konflik

---

<sup>30</sup> Sudharmono, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973 Jilid III...*, pp.96-97.

<sup>31</sup> Sudharmono, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973 Jilid III...*, p.99.

politik. Pada waktu itu para tuan tanah dengan mudah menyingkirkan para penghuni liar dengan membunuh mereka.<sup>32</sup>

Angkatan 66 merupakan gerakan mahasiswa yang terjadi pada peristiwa antara Januari–Maret tiga bulan pertama di tahun 1966 merupakan yang menentukan baik dari segi politik maupun dari sudut kebangkitanya generasi muda dibawah pimpinan KAMI. Peristiwa-peristiwa 1966 mempunyai tiga aspek yaitu pertama, memberi nilai penting pada peranan angkatan 66 dalam perpindahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Kedua, membentuk satu bingkai dimana angkatan 66 di uji dan diakui. Ketiga, berfungsi sebagai satu referensi pokok dalam arti bahwa gagasan-gagasan, aksi-aksi dan tingkah laku yang muncul pada tahun 1966 akan dijadikan model yang patut ditiru disamping sekaligus menampilkan gagasan orisinal yang mesti diketengahkan bila ada jiwa 45 maka ada pula semangat 66.<sup>33</sup>

Pada Febuari 1966, Sukarno melakukan usaha terakhirnya untuk menyelamatkan demokrasi terpimpin. Pada 21 Febuari, Ia merombak kabinetnya dan memberhentikan Nasution sebagai Menteri Pertahanan serta menghapus jabatan staf angkatan bersenjata. Omar Dhani dan Subandrio adalah dua orang yang dicari tentara dan dipertahankan sebagai menteri. Sukarno menunjuk Letkol Imam Sjafei sebagai Menteri Negara Urusan Keuangan. Perekonomian Indonesia masih berjalan tidak Stabil, indeks biaya bulan Desember 1965 Januari 1966 meningkat menjadi 50%. Pada 5 Maret 1966, Soeharto mengajukan kepada Sukarno daftar menteri yang harus diberhentikan, pengajuan tersebut ditolak oleh Sukarno.

### **Kondisi Perekonomian Mulai Stabil**

Setelah terjadinya peristiwa kudeta 1965, masa depan politik Indonesia masih belum jelas. Pada akhirnya, Soeharto membangun

---

<sup>32</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2010), p.595.

<sup>33</sup> Francios Riallon, *Politik dan Idiologi Mahasiswa Indonesia* (Jakarta; Cv. Taruna Grafika 1985). PP. 15-16

apa yang dikenal dengan “Orde Baru” Indonesia, untuk membedakannya dengan “Orde Lama” dari masa pemerintahan Soekarno. Orde Baru terbentuk dengan dukungan yang sangat besar dari kelompok-kelompok yang ingin terbebas dari kekacauan masa lalu. Dalam kehidupan intelektual, terjadi pembicaraan tentang suatu angkatan pimpinan muda baru dan suatu zaman baru, suatu “Angkatan 66”. Namun, Elite Orde Baru yang terdiri atas faksi militer yang didukung oleh sekelompok kecil sipil telah menghasilkan banyak sekutu. Periode tahun 1965-1975 mengundang beragam pendapat dari pengamat dalam dan luar negeri dari pihak sayap kanan memuji pemerintah Soeharto Karena mampu membasmi PKI dan mengadopsi kebijakan yang pro-Barat dan Sebaliknya dari sayap kiri mencibirnya karena kedua kebijakan tersebut. Di antara para pengamat yang kurang memihak, terdapat banyak pengamat di samping memuji prestasi pemerintah Soeharto dalam menyeimbangkan ekonomi, juga menjadi catatan buruk bagi hak asasi manusia dan korupsi pemerintah tersebut.<sup>34</sup>

### **Lahirnya Orde Baru**

Dalam strategi membangun negara pasca kepemimpinan Soekarno, Orde Baru memperkenalkan trilogi pembangunan. Di antaranya:

1. Terciptanya stabilitas politik yang mantap yang memungkinkan kelangsungan jalannya pembangunan.
2. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk memperbesar pemasukan devisa nasional.
3. Pemerataan hasil pembangunan untuk memenuhi prinsip keadilan sosial.<sup>35</sup>

Ketiga trilogi pembangunan ini yang bertujuan sebagai stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan adalah konsep dasar Orde Baru dalam menjalankan

---

<sup>34</sup> Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008...*, p.587.

<sup>35</sup> Sulastomo, *hari-hari yang Panjang Transisi Orde lama ke Orde Baru...* p.192.

roda pemerintahan. Soeharto yang berperan sebagai penggerak Orde Baru mencoba berbagai hal.

Setelah adanya nota politik yang disampaikan oleh KAMI kepada DPR-GR pada tanggal 2 Mei tahun 1966, sebagai mana telah penulis sebutkan pada BAB Sebelumnya, dengan nada yang sama Front Pancasila menandatangani pernyataan kebulatan tekad. Dalamanggapi suasana konpilik, pimpinan Mayjen Seharto Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 5 Mei 1966 mengeluarkan pernyataan yang isinya menegaskan posisi ABRI dalam suasana konpilik. Pimpinan ABRI menyatakan:

Bentuklah Pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia setelah memahamidengan seksama perkembangan keadaan yang mengejawantahkan suara hati nurani rakyat, dengan khidmat. Menanggapi dengan pernyataan, antara lain, sebagai berikut.

1. Angkatan Bersenjata adalah pengaman, pengawal, Revolusi Indonesia dengan ketiga kerangka tujuannya yang hendak dicapai berdasarkan Pancasila.
2. Angkatan Bersenjata adalah pengaman pimpinan Revolusi Indonesia dan pengaman Kewibawaan Peresiden Soekarno berserta ajaran-ajarannya dengan ikhtikad baik anak kandung revolusi berani dan papar dalam meberikan laporan dan pertimbangan kepada Pimpinan Peresiden
3. Angkatan Bersenjata hendak menempatkan hakikat kedudukan peresiden yang sebenarnya menurut kemurenian asal dan sendi pelaksaan UUD 1945.<sup>36</sup>

Pernyataan itu ditandatangani oleh Jenderal Soeharto, Jenderal A.H. Nasution, Laksamana Muda Laut Mulyadi, komdor Udara Rusmin Nuryadin, dan Komisaris Jenderal Polisi Soetjipto Joedodiharjo. Bersaman dengan pernyataan pimpinan ABRI, DPR-GR menyampaikan sumbangan pikiran untuk dijadikan acara pokok

---

<sup>36</sup> Marwati.Djoned Poesponegoro, *et al., eds. Sejarah Nasional Indonesia VI ...*, p.465.

dalam Sidang Umum IV MPRS. Saran-saran untuk perbaikan politik dalam negeri juga diajukan oleh Universitas Indonesia dalam kerja sama dengan KAMI dan KASI (Kesatuan Aksi Serjana Indonesia) pada simposium *Kebangkitan Semangat' 66 Menjelajah Tracee Baru* yang diselenggarakan pada tanggal 2-9 Mei 1966. Khusus mengenai bidang politik dalam negeri dengan tema”: Indonesia Negara Hukum”, antara lain diingatkan bahwa pada waktu yang lampau banyak sekali terjadi penyimpangan dari asas-asas serta norma-norma yang berlaku dalam suatu negara hukum. Peraturan hukum dan pelaksanaannya tidak mencerminkan jiwa Pancasila. Dalam bidang ketata negaraan ditunjukkan adanya penyimpangan-penyimpangan bahwa ada pejabat yang harus bertanggung jawab kepada pejabat yang lain, tetapi pejabat yang bersangkutan justru pengangkatannya tergantung dari pejabat yang tersebut pertama, seperti tercantum dalam Penetapan Pereside (Penpers) No: tahun 1959 tentang PMRS. Lembaga Yudikatif seperti Mahkamah Agung yang seharusnya melakukan “Kekeuasaan kehakiman yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah”, Ketuanya diangkat sebagai Menteri Negara yang menyebabkan pengintegrasian mahkamah agung dalam tubuh Kabinet sebagai Lembaga Eksekutif.<sup>37</sup>

Ketetapan yang kemudian diambil alih oleh MPRS ialah mencabut ketetapan PMRS yang mengatur tentang penelitian ajaran Pimpinan Besar Revolusi Bung Karno. Memasuki terakhirnya masa transisi, pemerintah menghadapi berbagai masalah nasional. Mengingat pemilihan umum sesuai dengan keputusan MPRS haru diselenggarakan dalam tahun 1968, sedangkan undang-undang yang mengatur belum ada, Pejabat Persiden didepan DPR MPRS-GR dan tujuan pemilihan umum ialah menciptakan stabilisasi politik untuk membangun wujud demokrasi yang sehat. Pemilihan umum paling cepat dapat diselenggarakan dalam jangka waktu 1 tahun sesudah diundangkannya berbagai undang-undang yang diperlukan. Tujuan

---

<sup>37</sup> Marwati.Djoned Poesponegoro, *et al., eds. Sejarah Nasional Indonesia VI...*, p. 276

pemilihan umum adalah untuk menyegarkan DPR dan MPRS-GR, mendekatkan pendudukannya kepada masyarakat yang diwakilinya.<sup>38</sup> Ada tiga masalah nasional selama tahun terakhir masa transisi (yang berlangsung dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 26 Maret 1968) yang diperhatikan oleh peresiden Orde Baru, yaitu adalah salah satunya sebagai berikut:

1. Memperkuat pelaksanaan sistem konstitusional, menegakan hukum, dan menumbuhkan kehidupan demokratis yang sehat sebagai syarat untuk mewujudkan stabilisasi politik.
2. Melaksanakan pembangunan lima tahun yang pertama sebagai usaha untuk member isi kepada kemerdekaan.
3. Tetap waspada dan sekaligus memberantas sisa-sisa kekuatan Laten PKI.

Pada tanggal 13 Februari 1967, para Panglima berkumpul kembali untuk membicarakan konsep yang telah disusun sebelum diajukan kepada Presiden. Pada pukul 11.00 para Panglima mengutus Jenderal Panggabean dan Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo untuk menghadap Presiden. Selama itu para Panglima Angkatan Bersenjata mengadakan serangkaian pertemuan membahas soal-soal yang akan dibicarakan dengan Presiden. Tanggal 19 Februari kembali diadakan pertemuan di Istana Bogor. Dalam pertemuan itu Presiden tetap menolak untuk menandatangani konsep yang diajukan Jenderal Soeharto. Sore harinya Pangliam Angkatan Laut (Pangal) Laksamana Mulyadi dipanggil oleh Presiden. Pangal Mulyadi datang menghadap dengan membawa konsep yang telah dipersiapkan. Presiden menyetujui dengan perubahan-perubahan kecil pada pasal 3 ditambah dengan kata-kata menjaga dan menegakkan revolusi.

Surat ketetapan Majelis permusyawaratan republic Indonesia tentang pembubaran PKI yaitu sebagai berikut:

#### KETETAPAN

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia

---

<sup>38</sup> Marwati.Djoned Poesponegoro, *et al., eds. Sejarah Nasional Indonesia VI...*, p. 557.

No:XXV/MPRS/1966

Tentang

Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

MAJLIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA.  
REPUBLIK INDONESIA, \*)

Menimbang:

- a. Bahwa paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada inti- hakekatnya bertentangan dengan pancasila;
- b. Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan;

Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Jenderal Dr. H. Nasution, *Menegakan Keadilan Dan Kebenaran* (Jakarta:Seruling Masa, 1967) , p. 152

## DAFTAR PUSTAKA

- Marwati.Djoned poesponegoro, *et al., eds. Sejarah Nasional Indonesia VI...* pp.483-484.
- Selamat Muljana, *Kesadaran Nasional: dari Kolonialisme sampai kemerdekaan jilid I* (Yogyakarta: LKIS, 2008), p. 283.
- Nazir Abu Nain, *Angkatan 66 Dalam Lintas Sejarah Perjuangan Bangsa* (Jakarta; cipro media, 2011) pp.70-71.